



ISBN 978 - 602 - 6997 - 104

23 24 26 21 30 34
22 25 27 28 29

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Tahun 2016 Indonesia Menuju SDGs

Madani Hotel-Medan, 28-29 Februari 2016

Tim Editor :

Dr. Agussani, M.AP

Dr. Azamris Chanra, M.AP

Rudianto, S.Sos, M.Si

Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom

Ribut Priadi, S.Sos, M.I.Kom

Arifin Saleh, S.Sos, MSP

Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd

Siti Hajar, S.Sos, MSP

Keynote Speaker :

Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Bekerjasama dengan :



ORGANISASI KEMASYARAKATAN SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN POLITIK (Studi Pada Ormas Alwasliyah Dan FORSU Pada Pilkada Kabupaten Batu Bara 2013).....	29
Ananda Mahardika	
POLITIK LGBT DALAM PENDEKATAN QUEER.....	30
Vellayati Hajad dan Ikhsan	
MEMBANGUN PERANAN PEMUDA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA AGAR TERCIPTA DESA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING.....	31
Sabam Manurung	
MENAKAR INDEPENDENSI TELEVISI DALAM PEMBERITAAN POLITIK NASIONAL.....	32
Abdul Aziz	
MEDIA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG.....	33
Abrar Adhani	
BERITA PILKADA DALAM BINGKAI MEDIA CETAK.....	34
Akhyar Anshori	
PROBLEMATIKA TATA KELOLA DAN PENGEMBANGAN SIARAN TVRI SUMATERA UTARA MENGHADAPI ISU PENGUATAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK.....	35
Anang Hermawan	
MEMAKSIMALKAN PERAN STAKEHOLDER DALAM MENGAWASI DAN MENINGKATKAN KUALITAS ISI SIARAN TELEVISI.....	36
Puji Santoso	
HUMANT INTEREST FOTO BERITA DI BALIK PERISTIWA KEBAKARAN.....	37
M. Said Harahap	
SURAT KABAR MEDAN DAN SENTIMEN KEAGAMAAN.....	38
Muhammad Thoriq	
ANALISIS FRAMING TENTANG BERITA HIV/AIDS PADA SURAT KABAR RIAU POS (Studi Pada Edisi 1 Desember 2015).....	39
Eko Hero	

**ORGANISASI KEMASYARAKATAN SEBAGAI MEDIA
PENDIDIKAN POLITIK
(Studi Pada Ormas Alwasliyah Dan FORSU Pada Pilkada
Kabupaten Batu Bara 2013)**

Ananda Mahardika
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: Anandamahardika88@yahoo.co.id

ABSTRAK

Politik merupakan elemen yang harus ada dalam sebuah negara. Politik dijadikan sebagai sarana untuk menjalankan kekuasaan negara. Politik tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Politik juga menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai penguasa. Oleh sebab itu politik harus dijalankan dengan benar, cerdas dan bertanggung jawab. Untuk menjalankan politik yang benar, cerdas dan bertanggung diperlukan sebuah mekanisme pendidikan politik yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan politik seharusnya menjadi tanggung jawab partai politik. Namun situasi kegaduhan politik yang terjadi saat ini membuat partai politik lebih banyak berkonsentrasi untuk mempertahankan eksistensinya dalam parlemen dari pada harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang menjadi konstituennya. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat tidak merasakan pendidikan politik dari partai politik. Fakta tentang partai politik yang tidak responsif dan aspiratif terhadap rakyat serta maraknya pemberitaan negatif tentang partai politik, menyulitkan posisi partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Stigma negatif masyarakat yang melekat pada partai politik berakibat pada timbulnya keengganan masyarakat untuk menerima sosialisasi apapun dari partai politik. Dalam situasi seperti ini harus ada lembaga lain yang mampu memberikan pendidikan politik tersebut, dan ormas (organisasi kemasyarakatan) dapat menjadi alternatifnya. Dari hasil penelitian penulis dalam pilkada kabupaten Batu Bara tahun 2013. Ditemukan dua ormas Islam yakni Alwasliyah dan FORSU (Forum Silaturahmi Ustadz) yang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat pemilih yang ada di kabupaten Batu Bara. Kedua ormas Islam ini berupaya untuk memotivasi masyarakat dalam Pilkada dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar menggunakan hak politiknya secara cerdas dan bertanggung jawab.

Kata kunci : organisasi masyarakat, pendidikan politik

Organisasi Kemasyarakatan sebagai Media pendidikan Politik

Pendahuluan

Politik adalah salah satu kata yang sangat akrab dengan telinga masyarakat Indonesia. Terlebih setelah era reformasi bergulir politik bukanlah suatu hal yang tabu bagi masyarakat untuk diperbincangkan, diperdebatkan bahkan untuk dikritisi. Tapi ironisnya ketika politik menjadi sesuatu yang akrab bagi masyarakat, disisi lain tidak terdapat sebuah usaha dan wadah untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada pada kelas *grassroot*. Munculnya Jumlah partai politik yang membludak juga tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Praktis masyarakat hanya mendapatkan pemahaman tentang politik dari media massa. Namun berita yang disuguhkan oleh media massa lebih banyak menunjukkan berbagai penyimpangan politik yang terjadi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dari media massa tersebut masyarakat melihat politik sebagai alat untuk merebut, membagi serta mempertahankan kekuasaan, dan proses politik menjadi alasan lahirnya korupsi. Semua pemberitaan tersebut mengakibatkan sebagian besar masyarakat memberi stigma yang negatif terhadap politik. Masyarakat mengasumsikan politik dekat dengan kebohongan, kelicikan dan politik hanya menguntungkan orang – orang yang memegang kekuasaan, dan masyarakat hanya menjadi korban politik atas kepentingan – kepentingan para penguasa yang memegang dominasi kendali kekuasaan.

Meskipun semua hal tersebut adalah sebuah kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, namun pada hakikatnya sebuah negara tidak terlepas dari kegiatan – kegiatan politik. Hal ini dikarenakan politik lahir untuk mengatur kehidupan negara. Plato dan Aristoteles dalam Halim (2014:1) yang merupakan filsuf dari Yunani yang menjadi tempat lahirnya konsep politik memandang bahwa politik sebagai ikhtiar manusia menciptakan tatanan masyarakat yang baik. Politik diposisikan sebagai ruang bersama dimana setiap individu berjuang meningkatkan bakat dan kehidupannya. Dalam Islam Politik diartikan dengan istilah *Siyasah* yang secara etimologis berarti mengatur, mengurus, mengendalikan atau membuat keputusan. *Siyasah* dimaknai sebagai ilmu tentang pemerintahan, bertujuan mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.

Jika merujuk pada konsep politik diatas, maka tidak ada satu alasanpun untuk memberikan asumsi yang negatif terhadap politik. Tetapi publik dinegeri ini sudah terlanjur memaknai politik dengan berbagai anggapan miring. Akibatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik menjadi rendah. Hal ini dapat dibuktikan melalui penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Dalam Pemilu legislatif 2014 angka golput (golongan putih) mencapai 24,89 % , pemilu pilpres 27,7 %. (kpu.go.id). Sedangkan dalam pilkada Sumatera utara tahun 2013 dari total jumlah pemilih hanya 48,5% yang menggunakan hak pilihnya, artinya ada 51,5% pemilih

yang tidak menggunakan hak pilihnya. (viva.co.id 16 Maret 2013) .Rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan pilkada ini menunjukkan apatisme masyarakat terhadap politik. Masyarakat tidak meyakini bahwa pemilu dan pilkada merupakan sebuah proses politik yang menempatkan elit sebagai orang yang merepresentasikan kepentingan rakyat dan memperjuangkan kepentingan tersebut untuk dijadikan sebagai sebuah kebijakan yang mensejahterakan rakyat. Pemahaman seperti ini tidak boleh dibiarkan terus berlarut - larut, masyarakat harus mendapat pemahaman dan pendidikan politik yang baik. Tanggung jawab ini seharusnya diperankan oleh partai politik, namun ironisnya keberadaan belasan partai politik yang legal dinegeri ini tidak memainkan peran tersebut secara baik. Dualisme kepengurusan, jual beli dukungan, dan politik dagang sapi di parlemen cenderung lebih mewarnai kehidupan partai politik, ketimbang memberikan pendidikan politik kepada rakyat maupun para kadernya.

Ketika parpol (partai politik) tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya secara penuh maka harus ada infrastruktur lain yang dapat menjadi alternatif untuk memberikan pendidikan politik kepada publik. Adapun infrastruktur lain yang dapat menjalankan tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik kepada publik adalah organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurut undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang organisasi kemasyarakatan menjelaskan bahwa organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Merujuk kepada isi dari undang – undang tersebut dapat dipahami bahwa ormas adalah sebuah wadah perkumpulan resmi yang diakui oleh negara sehingga bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai sarana pendidikan politik. Ormas juga bersifat lebih fleksibel dalam kepengurusannya karena didirikan atas dasar sukarela dan kepentingan bersama, sehingga situasi ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Karena pada dasarnya pendidikan politik yang dimaksudkan adalah untuk memberikan pemahaman politik secara benar kepada masyarakat, yakni politik yang didasarkan pada karakteristik kebudayaan bangsa dan falsafah Pancasila serta menanamkan keyakinan bersama bahwa politik sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Pentingnya Pendidikan Politik

Pendidikan merupakan salah satu unsur yang sangat vital dalam suatu negara. Sehingga berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sistem dan kualitas pendidikan. Pendidikan diyakini sebagai sebuah instrumen yang dapat memajukan bangsa dalam segala aspek. Dunia pendidikan selalu menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan. Standar, biaya, kualitas, dan kemudahan akses untuk mendapatkan pendidikan bagi semua elemen masyarakat merupakan masalah – masalah yang meliputi dunia pendidikan di Indonesia. Pemerintah terus berupaya dan mencari solusi bagaimana memperbaiki sistem pendidikan yang ada dinegeri ini mulai jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Namun ada suatu hal yang terlupakan ketika bicara soal pendidikan, yakni pendidikan politik. Cita – cita memajukan pendidikan nasional merupakan persoalan kebangsaan dan kenegaraan, karena dalam masalah tersebut tidak hanya menyangkut soal kepentingan publik secara nasional tetapi juga menyangkut peran dan tanggung jawab pemerintah. Dan ketika

memasuki arena lingkup pemerintah maka disitulah politik memainkan peranannya sebagai sebuah cara untuk mengatur mengurus dan mengendalikan sistem pendidikan. Semua cita – cita tersebut bisa diwujudkan dengan praktek kegiatan politik yang baik, bersih, jujur, bertanggung jawab dan professional, dan proses politik yang seperti ini hanya bisa direalisasikan dengan pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang fungsi politik dalam sebuah negara, masyarakat juga dapat memahami hak dan kewajibannya dalam setiap kegiatan politik yang telah diatur dalam konstitusi negara.

Menurut Alfian pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. (uungmashuri.blogspot.com/2011/01/pendidikan-politik.html). Rusadi Kartaprawira (1988:54) mengartikan pendidikan politik sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Dalam Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda dijelaskan bahwa tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Definisi dan inpres diatas menunjukkan betapa pentingnya pendidikan politik. Karena kegiatan politik harus dijalankan oleh orang yang mampu memahami politik secara benar dan baik. Sehingga fungsi politik yang diperankannya dapat ditujukan untuk kepentingan publik dan kemajuan bangsa.

Organisasi Kemasyarakatan (ormas) setelah Partai Politik

Pendidikan politik seharusnya menjadi tanggung jawab partai politik, hal ini sesuai dengan amanat undang – undang nomor 2 tahun 2008 pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun sayangnya sangat minim kegiatan partai politik (parpol) yang ditujukan untuk memberikan pendidikan kepada kadernya maupun kepada masyarakat. Umumnya parpol hanya melakukakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengisian jabatan struktural partai dari tingkat pimpinan ranting hingga tingkat pimpinan pusat. Dan kegiatan partai hanya efektif ketika ada event pemilu ataupun pilkada. Pemberitaan partai politik diberbagai media massa yang menunjukkan perebutan kekuasaan, kader yang tersandung korupsi, dan kebijakan parpol yang tidak pro rakyat menyebabkan publik tidak yakin bahwa parpol merupakan institusi yang mampu memberikan pendidikan politik. Sehingga perlu ada sebuah institusi lain yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk memberikan pendidikan politik kepada publik. Setelah parpol gagal melakukan fungsi dan tanggung jawabnya maka organisasi kemasyarakatan (ormas) dapat dijadikan sebagai alternatif sarana memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan mitra bagi pemerintah untuk memberdayakan masyarakat. Tentunya dalam fungsi pemberdayaan ini ormas juga dapat dijadikan sebagai media untuk memberikan pendidikan politik kepada publik. Berdasarkan aturan perundang – undangan, ormas tidak memiliki kewenangan yang bersifat politis. Namun kenggotaan ormas yang bersifat suka rela dan diikat atas dasar kepentingan bersama memudahkan doktrinasi pendidikan politik yang sesuai dengan kebudayaan Indonesia dan karakteristik pancasila, karena ormas juga dibentuk dengan azas Pancasila. Ormas menjadi harapan baru dalam memberikan pendidikan politik, posisi ormas yang lebih netral secara politik memberi ruang untuk membentuk karakteristik politik publik yang cerdas, bertanggung jawab, dan berwawasan kebangsaan.

Organisasi kemasyarakatan (ormas) Media Pendidikan Politik

Organisasi masyarakat atau yang lazim disebut ormas merupakan suatu bentuk organisasi yang berbasis pada massa. Menurut undang – undang nomor 7 tahun 2003 tentang organisasi kemasyarakatan menjelaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam undang – undang tersebut juga disebut tentang tujuan dan fungsi ormas. Adapun fungsi dan tujuan dari ormas tersebut meliputi :

Tujuan organisasi kemasyarakatan (ormas)

- a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat
- e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. mewujudkan tujuan negara.

Fungsi organisasi kemasyarakatan (ormas)

- a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
 - c. penyalur aspirasi masyarakat
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. pemenuhan pelayanan sosial;
 - f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- dan/atau

g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Merujuk pada definisi, tujuan, fungsi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang disebutkan dalam undang – undang nomor 7 tahun 2003 dapat ditemukan sebagai celah yang memungkinkan ormas untuk dijadikan sebagai media pendidikan politik. Dalam proses pendidikan politik ormas dapat menjadi wadah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan berbangsa bernegara. Ormas menjadi tempat pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan partisipasi sosial, penyalur aspirasi dan sekaligus penjaga nilai – nilai keagamaan, kebudayaan dan kebangsaan. Ada beberapa celah yang dapat digunakan untuk menjadikan ormas sebagai media pendidikan politik. Celah atau ruang ini diadaptasi dari fungsi dan tujuan ormas yang tertuang dalam undang – undang nomor 7 tahun 2003 tentang organisasi kemasyarakatan. Adapun celah atau ruang tersebut meliputi :

1. Organisasi kemasyarakatan sebagai sarana meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
Ormas merupakan perhimpunan yang berbasis pada massa. Jumlah pengurus dan anggota ormas yang banyak dapat menjadi objek pembekalan – pembekalan dan pemahaman politik yang sesuai dengan karakter bangsa dan falsafah pancasila.
2. Ormas Sebagai wadah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat
Melalui keberadaan ormas masyarakat tidak hanya dimungkinkan untuk mendapatkan pelayan – pelayanan umum sebagai warga negara tetapi juga mendapatkan pemahaman dan pembelajaran politik, sebagai bekal bagi anggotanya untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik lokal maupun nasional.
3. Organisasi kemasyarakatan sebagai penyalur aspirasi Anggota
Dalam menyalurkan aspirasi anggotanya ormas tentunya harus melalui prosedur – prosedur tertentu dalam pemerintahan yang biasanya bersifat politis. Hal ini dapat dijadikan sebagai arena bagi para pengurus dan anggota ormas untuk menjadikan usaha – usaha mengemukakan dan menyalurkan aspirasi sebagai media pembelajaran dan pendidikan politik.
4. Organisasi kemasyarakatan sebagai sarana menjaga nilai – nilai keagamaan, pancasila, dan kedaulatan bangsa.
Komitmen ormas untuk menjadi elemen yang menjaga nilai – nilai keagamaan, pancasila, dan kedaulatan bangsa, dapat menjadi bekal untuk memudahkan pendidikan politik yang diarahkan pada pemahaman bahwa proses politik harus dijalankan atas dasar religius, pancasila dan karakteristik bangsa
5. Organisasi kemasyarakatan sebagai sarana mewujudkan tujuan negara
Organisasi kemasyarakatan merupakan sebuah media sosialisasi untuk mengenalkan tujuan negara dan melakukan berbagai kegiatan yang bersinergi dengan program pembangunan dan tujuan negara. Dan ketika berbicara soal tujuan negara tidak bisa terlepas dari kegiatan politik.

Kelima celah atau ruang ini dapat dijadikan sebagai pintu untuk menjadikan ormas sebagai media pendidikan politik. Sehingga hal ini dapat dijadikan alternative untuk mengisi kosongan peran yang seharusnya menjadi tanggung jawab partai politik. Dengan cara ini

diharapkan masyarakat menjadi dewasa dalam berpolitik dan aktif dalam setiap kegiatan politik yang diselenggarakan negara baik pada tatanan lokal maupun nasional.

Kesimpulan

Politik adalah sebuah keharusan dalam suatu negara. Masyarakat tidak dapat lepas dari kegiatan – kegiatan yang bersifat politis. Oleh sebab itu untuk membentuk masyarakat yang mampu berpolitik secara cerdas dan bertanggung jawab dibutuhkan sebuah mekanisme pendidikan politik yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan falsafah pancasila. Pendidikan politik harus digarap secara serius. Ketika partai politik tidak mampu menjalankan fungsi dan perannya secara baik maka harus ada alternative lain yang dapat digunakan untuk menjadi media pendidikan politik. Alternatif tersebut adalah organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan diharapkan mampu menjadi media untuk memberikan pemahaman dan pembekalan tentang politik yang diinginkan dan dijalankan oleh suatu negara.

Sumber Referensi

Halim, Abdul, 2014 : *Politik Lokal (Pola, actor, dan alur dramatikalnya)*, LP2B

Kantaprawira, Rusadi. 2004 : *Sistem Polilik Indonesia: Suatu Model Pengantar*
Sinar Baru Algensindo. Bandung

Prihatmoko, j, Joko, 2005 : *Pemilihan kepala daerah langsung*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Sahlan, Sartono, Marwan, Awaluddin, 2012 : *Nasib demokrasi local dinegeri Bar – Bar*, Thafa Media.

Situmorang, Jubair, 2012 : *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, pustaka setia Bandung.

uungmashuri.blogspot.com/2011/01/pendidikan-politik.html

Kpu.co.id

Viva.co.id

Undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang organisasi kemasyarakatan



**PROSIDING
KONFERENSI NASIONAL
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TAHUN 2016
Indonesia Menuju SDGs**